



CPNS 2017



MATERI PENGANTAR SOAL

**PENGANTAR SOAL PERKEMBANGAN POLITIK
DALAM NEGERI, EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya semata, maka materi pengantar soal Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi, Dan Pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik. Materi ini disusun dengan tujuan untuk menjadi bahan ajar bagi para PNS yang hendak mengambil ujian dinas dalam rangka kenaikan jabatan yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Promosi kenaikan pangkat didasarkan pada kemampuan, senioritas, ujian, wawancara, dan gabungan beberapa faktor. Promosi kenaikan pangkat dilakukan tidak saja untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan, namun juga meningkatkan kinerja PNS. Materi pengantar soal ini disusun khusus untuk memfasilitasi terselenggaranya Ujian Dinas Tingkat I dan II dalam rangka kenaikan jabatan tersebut.

Atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun materi pengantar soal ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terima kasih atas masukan dan informasi yang diberikan. Kami sangat menyadari bahwa materi pengantar soal ini masih jauh dari sempurna, sehingga setiap masukan dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam pembuatan materi pengantar soal selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB 1 PERIODE ORDE LAMA	1
A. Pendahuluan	1
B. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)	7
C. Masa Demokrasi Terpimpin (159-1967)	8
BAB 2 PERIODE ORDE BARU	10
A. Periode Orde Baru	10
BAB 3 PERIODE ORDE REFORMASI	18
A. Pemerintahan Presiden BJ. Habibie	18
B. Pemerintahan Transisi (Pasaribu, t,t)	21
C. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid	23
D. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri	34
E. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	37
F. Pemerintahan Presiden Joko Widodo	39
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB 1

PERIODE ORDE LAMA

A. Pendahuluan

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan.

Dinamika hubungan Soekarno dengan Mohammad Hatta sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berlaku pada saat itu. Moh. Mahfudz (1998) dalam *Politik Hukum di Indonesia*, secara lebih spesifik menguraikan perkembangan konfigurasi politik Indonesia ketika itu sebagai berikut: pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi pembalikan arah dalam penampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik menjadi cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, dimana Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pada periode ini pernah berlaku tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Konfigurasi politiknya dapat diberi satu kualifikasi yang sama, yaitu konfigurasi politik yang demokratis. Indikatornya adalah begitu dominannya partai-partai politik. Kedua, konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959, mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957, ketika Presiden Soekarno melontarkan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan pembalikan total terhadap sistem demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh partai-partai politik melalui *free fight* (Muhaimin, 1991).

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta

perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat berkurang. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan "Deklarasi Bogor."

Pada pemerintahan Soekarno, terjadi Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia.

Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan baratpulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 01 Desember 1961.

Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan

Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jayapada 1 Mei 1963.

Gerakan 30 September juga mewarnai pemerintahan Presiden Soekarno. Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini. Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Periode antara 1945 dan 1966 yang diwarnai oleh pergulatan keras dan tampak semerawut. Masa pemerintahan Soekarno kebijakan ekonomi pembangunan masih sangat labil, yang didera oleh berbagai persoalan antaranya pergolakan politik yang belum kondusif dan juga sistem pemerintahan yang belum baik, sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan (Rahardjo, 1983).

Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno bersikap anti batuan asing dan berorientasi ke dalam. Soekarno menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri atau yang biasa disebut “berdikari” (Mas’oed, 1989). Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia haruslah dilakukan oleh Indonesia sendiri. Bahkan Soekarno melakukan kampanye Ganyang Malaysia yang semakin memperkuat posisinya sebagai oposisi bantuan asing. Semangat nasionalisme Soekarno menjadi pemicu sikapnya yang tidak menginginkan pihak asing ikut campur dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Padahal saat itu di awal kemerdekaannya Indonesia membutuhkan pondasi yang kuat dalam pilar ekonomi. Sikap Soekarno yang anti bantuan asing pada akhirnya membawa konsekuensi tersendiri yaitu terjadinya kekacauan ekonomi di Indonesia. Soekarno cenderung mengabaikan permasalahan mengenai ekonomi

negara, pengeluaran besar-besaran yang terjadi bukan ditujukan terhadap pembangunan, melainkan untuk kebutuhan militer, proyek mercusuar, dan dana-dana politik lainnya. Soekarno juga cenderung menutup Indonesia terhadap dunia luar terutama negara-negara barat.

Hal itu diperkeruh dengan terjadinya inflasi hingga 600% per tahun pada 1966 yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan ekonomi bagi Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada era Orde Lama kemudian menurun karena rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan (Pasaribu, t,t):

- Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
- pada tanggal 6 Maret 1946, AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
- Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
- Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- Kas negara kosong.
- Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain (Pasaribu, t,t):

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus *blockade* dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia

yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia), mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus *blockade* Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Ir. Darmawan Mangunkusumo) dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu: masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan ini dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan *effisiensi* angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementerian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.
6. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian

akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

B. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka (Pasaribu, t,t). Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain (Pasaribu, t,t):

- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
- Program Benteng (yang diprakarsai oleh Dr Sumitro Joyohadi kusumo pada Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
- Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
- Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan

dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

C. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain (Pasaribu, t,t):

- Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
- Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga

salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain (Pasaribu, t,t). Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah:

1. Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (Masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh banggunya kabinet, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh

BAB 2

PERIODE ORDE BARU

A. Periode Orde Baru

Setelah munculnya surat Putusan yang berisi tentang pencabutan keputusan tentang Soekarno sebagai presiden seumur Hidup sekaligus melengserkan Soekarno dari kursi kepresidenan, dan Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno, dan mulailah pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Konsolidasi Orde Baru, sudah tentu tidak lepas dari kondisi yang ditinggalkan oleh Orde Lama.

Dalam pemerintahan Orde Baru tidak semuanya peninggalan Orde Lama di buang dan di tinggalkan. Tekad Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen tetap dilaksanakan (Sulastomo, 2008). Belajar dari pengalaman masa Orde Lama yang belum ada kestabilan politik di Indonesia. Ini disebabkan oleh kondisi politik Indonesia yang belum stabil akibat banyaknya paham dan organisasi masyarakat yang berkembang pada saat itu, Oleh karena itu untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan stabilitas negara maka Soeharto melakukan beberapa kebijakan diantaranya (Sulastomo, 2008):

- a. Terciptanya stabilitas politik yang mantap, yang memungkinkan kelangsungan jalannya pembangunan.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk memperbesar kue nasional
- c. Pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keadilan sosial.

Atau trilogi ini sering dikenal sebagai Stabilitas, pembangunan, dan Pemerataan. Dalam penerapannya pemerintahan orde Baru beranggapan bahwa dalam menciptakan stabilitas negara dibutuhkan satu ideologi dalam segala bidang. Kehidupan politik dan konflik ideologi yang tinggi pada masa orde lama dinilai tidak kondusif.

Dalam menciptakan berjalannya pembangunan bangsa, Orientasi politik “sebagai panglima” diganti dengan “Orientasi Program” untuk mengatasi ini kebijakan yang dilakukan Soeharto yaitu penyederhanaan sistem politik dan de-ideologi yang berkembang di Indonesia (Sulastomo, 2008).

Penyelesaian sistem politik dengan cara menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia dengan dikeluarkannya UU partai politik tahun 1973 yang

menyebabkan terjadinya fusi guna menyederhanakan partai politik. Terbentuknya partai-partai gabungan misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari 4 partai Islam yaitu Permusi, NU, PSII, dan Perti.

Tidak hanya partai Islam beberapa partai agama dan partai Nasional juga mengalami fusi misalnya PDI (fusi dari Partai nasionalis, Katolik, dan Kristen) penggabungan partai politik ini bukan didasarkan pada kesamaan ideologi akan tetapi lebih kepada kesamaan program-program partai tersebut. Selain itu Soeharto juga menetapkan kebijakan de-ideologi sistem politik dengan (Sulastomo, 2008),

1. Cara memberlakukan Asas Tunggal Pancasila bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
2. Kebijakan Masa Mengambang (*floating-mass*)
3. Adanya Mayoritas tunggal yaitu Partai Politik Golkar.
4. memberikan peluang kepada pihak asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia
5. Mengembangkan Industri terutama dalam bidang industri pertanian dan bertujuan memenuhi kebutuhan pangan.
6. Pemerataan hasil pembangunan dengan melalui instruksi presiden

Di era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, slogan “Politik sebagai Panglima” berubah menjadi “Ekonomi sebagai Panglima”. Karena pada masa ini, pembangunan ekonomi merupakan keutamaan, buktinya, kebijakan-kebijakan Soeharto berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Kepemimpinan era Soeharto juga berbanding terbalik dengan kepemimpinan era Soekarno.

Jika kebijakan Soekarno cenderung menutup diri dari negara-negara barat, Soeharto malah berusaha menarik modal dari negara-negara barat itu. Perekonomian pada masa Soeharto juga ditandai dengan adanya perbaikan di berbagai sektor dan pengiriman delegasi untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman dari negara-negara barat dan juga IMF.

Jenis bantuan asing ini sangat berarti dalam menstabilkan harga-harga melalui “injeksi” bahan impor ke pasar. Orde Baru berpandangan bahwa Indonesia memerlukan dukungan baik dari pemerintah negara kapitalis asing maupun dari masyarakat bisnis internasional pada umumnya, yakni para *banker* dan perusahaan-perusahaan multinasional (Mas’oed 1989).

Orde Baru cenderung berorientasi keluar dalam membangun ekonomi. Langkah Soeharto dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, tahap penyelamatan yang bertujuan untuk mencegah agar kemerosotan ekonomi tidak menjadi lebih buruk lagi. Kedua, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. Ketiga, pembangunan ekonomi. Hubungan Indonesia dengan negara lain dipererat melalui berbagai kerja sama, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional, terutama PBB, dan penyelesaian konflik dengan Malaysia. Awalnya bantuan asing sulit diperoleh karena mereka telah dikecewakan oleh Soekarno, namun dengan berbagai usaha dan pendekatan yang dilakukan kucuran dana asing tersebut akhirnya diterima Indonesia. Ekonomi Indonesia mulai bangkit bahkan akhirnya menjadi begitu kuat.

Untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat tergelincir pada paruh pertama 1960-an, pemerintah Orde Baru segera setelah memegang tampuk kekuasaan mencanangkan berbagai program rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian. Orde baru memiliki perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air.

Orde baru menjalin kerjasama dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Sebelum melakukan pembangunan Repelita, dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Penyusunan rencana Pelita secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

Pemerintah menempuh kebijakan *moderately outward oriented* yang antara lain ditandai dengan peningkatan utang luar negeri, kebijakan substitusi impor di bidang perdagangan dan industri, liberalisasi investasi asing dan domestik, penyesuaian

nilai tukar rupiah terhadap *dollar* AS tanggal 21 Agustus 1971, dan kebijakan rasionalisasi beberapa BUMN

Terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia selama masa Orde Baru jika dilihat dari perubahan pangsa PDB (Produk Domestik Bruto), terutama dari sektor industri. Kontribusi sektor industri sekitar 8% (1960) menjadi 12% (1983). Hal ini menunjukkan terjadinya proses industrialisasi atau transformasi ekonomi dari negara agraris menuju semi industri. Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat pada paruh dekade 80-an, di mana pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi di sektor moneter maupun riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Deregulasi menyebabkan terjadinya pergeseran dari semula tersentralisasi menjadi desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar. Pada level meso (tengah) dan mikro, pembangunan tidak terlalu berhasil jumlah kemiskinan tinggi, kesenjangan ekonomi meningkat di akhir 90-an. Secara umum dalam Orde Baru terjadi perubahan orientasi kebijakan ekonomi yang semula bersifat tertutup di Orde Lama menjadi terbuka pada Orde Baru. Perkembangan ekonomi masa Orde Baru lebih baik dari Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor (Pasaribu, t,t):

- Kemauan Politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi.
- Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.
- Sumber daya manusia yang lebih baik. SDM di masa ORBA memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
- Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, PMA dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.

- Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Selain terjadi *oil boom* (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat), juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era ORBA khususnya setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik daripada semasa ORLA.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stabilitas politik sehingga mendukung. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.

Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.

APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap *dollar* Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.

Format APBN pada masa Orde Baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan sesuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani. APBN pada masa itu diberlakukan atas

dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit. Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran dimasa yang akan datang. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.

Sayangnya kekuatan ekonomi itu didapatkan dari bantuan asing yang suka atau tidak harus dikembalikan. Suntikan bantuan dari Amerika Serikat maupun Jepang cukup berperan besar dalam perbaikan ekonomi di Indonesia. Begitupun dengan IMF yang dinilai sangat bermanfaat dalam memperjuangkan Indonesia di hadapan para kreditor asing (Mas'oed, 1989). Namun, bantuan tersebut tidak serta merta membuat Indonesia tumbuh dengan prestasi ekonomi, Indonesia ternyata semakin terjerat keterpurukan perekonomian dalam negeri akibat syarat-syarat dan bunga yang telah direncanakan negara penyuntik bantuan. Booth (1999) menjelaskan kegagalan industri dalam negeri dipasar global serta terjun bebasnya nilai rupiah juga menjadi warisan keterpurukan ekonomi pada Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan ekonomi keluar. Maka, kini hal tersebut menjadi tantangan pemerintahan reformasi untuk menuntaskan permasalahan ekonomi dalam negeri.

BAB 3

PERIODE ORDE REFORMASI

A. Pemerintahan Presiden BJ.Habibie

Ketika B.J Habibie dilantik menjadi Presiden RI, keadaan di Indonesia sedang terjadi kericuhan. Banyak massa sedang berdemo dan berhasil menduduki gedung MPR. Sebelum itu terjadi Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 dimana 6 mahasiswa ditembak oleh tentara. Bahkan sebelum itu banyak terjadi kericuhan lainnya. Tuntutan mahasiswa tentang reformasi dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 1998. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang sangat tajam. Pada saat itu, pemerintah Soeharto merencanakan kenaikan BBM. Dalam menghadapi tuntutan reformasi mahasiswa dan golongan intelektual lainnya, presiden Soeharto memberikan janji melalui Menteri Dalam Negeri R. Hartono bahwa akan terjadi reformasi namun bukan pada tahun 1998 melainkan tahun 2003 pada akhir masa kerja kabinet Pembangunan VII yang baru dibentuk (1998-2003).

Namun janji ini memunculkan kekecewaan di kalangan mahasiswa dan intelektual lainnya. Meskipun ucapan R. Hartono diralat oleh Menteri Penerangan Prof. Ali Alwi Dahlan. Sehingga kekecewaan itu ditumpahkan lewat turun ke jalan-jalan. Krisis total politik, ekonomi, sosial-budaya, dan mental ini mendorong keberanian para tokoh masyarakat mengumumkan tidak berlakunya lagi pemerintahan kabinet VII Presiden Soeharto (Fachry Ali. 2013). Kebijakan Politik Habibie Selama Masa Pemerintahannya (Fachry Ali. 2013),

a. Pembebasan Tahanan Politik.

Secara umum, tindakan pembebasan ini meningkatkan legitimasi Habibie baik dari dalam maupun dari Luar Negeri. Ini terkait dengan tuduhan bahwa bangsa Indonesia tidak memberi keterbukaan dalam kebebasan individu. Sehingga para tahanan politik diberi amnesti (pengampunan) dan abolisisi (penghapusan pidana).

b. Naiknya Habibie ke kursi presiden membuat Indonesia sedikit berubah pada bidang demokrasi.

Orde Baru yang cenderung otoriter oleh Habibie dirubah menjadi demokratis terutama terkait dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, Habibie menarik kembali pencabutan SIUPP mass media. Kebebasan pers ini terkait dengan pemikiran Habibie bahwa sebuah pemerintahan harus mengakui bahwa ada kerusakan didalam tubuh bangsa. Pemikiran ini berdasar kepada *Accumulated Damaged Tolerance Theory* yang ada dalam dunia penerbangan. Sesuai dengan Teori Toleransi Akumulasi Kerusakan maka Habibie membuat ruang toleransi kerusakan negara dan bangsa. Karena menurut Habibie selama 53 tahun para pemimpin Indonesia tidak memberikan toleransi ini.

- c. Pembentukan Partai Politik dan Percepatan Pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999

Presiden Habibie mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Hal ini dilakukan karena partai politik di Indonesia hanya terdiri dari tiga Parpol. Ada 40 kontestan dari 150 parpol yang terdaftar, meskipun pada akhirnya parlemen dan MPR yang memperpendek masa kepresidenan Habibie.

- d. Mengakhiri kekuasaan negara yang terpusat.

Habibie mengeluarkan UU Otonomi yang radikal (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999). Orde Baru yang pembangunannya bersifat sentralisasi di Pulau Jawa dialihkan menuju Otonomi Daerah, dimana setiap daerah berhak mengembangkan daerahnya masing-masing sehingga tercapai keadilan sosial bagi masyarakat di Indonesia.

Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan (Rachbini, 2001). Pemerintahan presiden BJ.Habibie Yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-

manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan 'jual'. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil.

Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah memburuk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp. 2.500 menjadi Rp 2.650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
- Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
- Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

B. Pemerintahan Transisi (Pasaribu, t,t)

Diawali dengan melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap USD pada Mei 1997, sehingga para investor mengambil keputusan jual baht untuk beli USD. Melemahnya baht merambah sampai ke mata uang Asia lainnya (Ringgit Malaysia hingga Rupiah). Hal ini menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia. Nilai tukar Rupiah terus melemah terhadap USD, pemerintah melakukan intervensi dengan memperluas rentang intervensi. Namun hal itu tidak banyak membantu pemulihan nilai tukar rupiah thd USD. Pada Oktober 1997, pemerintah memutuskan meminta bantuan keuangan pada IMF.

Paket bantuan I sebesar USD 40 Milyar diturunkan pada akhir Oktober 1997. Bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan penutupan atau pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Setelah paket bantuan, justru nilai tukar Rp semakin melemah. Akhirnya pemerintah membuat kesepakatan dengan IMF dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI) pada Januari 1998. LoI berisi 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural. Di bidang fiskal : penegasan penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan pengeluaran pemerintah (menghilangkan subsidi BBM dan listrik), membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan pemerintah. Setelah gagal dengan kesepakatan pertama, dibuat lagi kesepakatan baru pada Maret 1998 dengan nama Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MTKEK).

Memorandum tambahan itu antara lain: Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah inflasi. Restrukturisasi perbankan dengan tujuan untuk menyehatkan perbankan nasional. Reformasi struktural dalam perekonomian. Penyelesaian utang luar negeri swasta dengan melibatkan pemerintah. Bantuan untuk rakyat kecil sebagai kompensasi penurunan subsidi BBM dan listrik. Pada periode ini masih dipimpin oleh Soeharto, namun pada akhir Mei 1998, terjadi gerakan mahasiswa untuk menurunkannya. Soeharto kemudian digantikan oleh Habibie yang merupakan awal terbentuknya pemerintahan transisi. Disebut dengan transisi karena seharusnya melakukan perubahan (reformasi) terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, tetapi ternyata pemerintahan yang baru ini masih dianggap bagian dari gaya Orde Baru dan tidak ada perubahan yang nyata dalam perekonomian.

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
 - Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
 - Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
 - Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
 - Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
 - Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
 - Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

C. Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid

Presiden Abdurrahman Wahid memperjuangkan suatu tatanan politik nasional yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan, dimana semua warga Negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang asal-usul Agama, Ras, Etnis, Bahasa, dan Jenis kelamin. Konsekuensinya, politik umat Islam di Indonesia pun terikat dengan komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusivisme, sektarianisme, dan privilege-privilege politik harus dijaui. Termasuk di sini adalah pemberlakuan ajaran agama melalui Negara dan hukum formal, demikian pula pula ide proposionalitas dalam perwakilan di lembaga-lembaga Negara. Tuntutan-tuntutan semacam ini jelas berlawanan dengan asas kesetaraan (egalitarianisme) bagi warga Negara.

Implikasi lain dari komitmen terhadap asas kesetaraan ini adalah penolakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap ide pemberntukan masyarakat dan Negara Islam sebagai tujuan umat di Indonesia. Menurutnya, kedua ide tersebut pada prinsipnya memiliki persamaan dengan tujuan formalitas ajaran Islam dalam masyarakat lewat perangkat hukum. Ini berarti keinginan untuk menegakkan sebuah komunitas politik yang eksklusif di luar jangkauan hukum obyektif yang diberlakukan kepada seluruh warga Negara. Hasrat tersebut tidak konsisten dengan semangat UUD 1945 yang hanya mengakui komunitas politik tunggal, yaitu warga Negara

Indonesia. Karena bagi Presiden Abdurrahman Wahid, seperti dikemukakan oleh Douglas Ramage, sebuah negara Islam tidak perlu ada di negeri ini, yang harus diperjuangkan oleh umat dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia dimana “umat Islam yang kuat, dalam pengertian berfungsi dengan baik” sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain (Hikam, 2000).

Munculnya konflik panjang antara para politisi DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid selama pemerintahannya yang ditandai dengan kekecewaan- kekecewaan kalangan poros tengah sebagai pengusung naiknya Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, ketika Presiden Abdurrahman Wahid membiarkan Menko Kesra dan Taskin, Hamzah Haz yang juga ketua umum PPP mengundurkan diri dari kabinet yang hanya sebulan setelah pembentukannya. Padahal beberapa waktu sebelumnya atau setelah pembentukan kabinet, Presiden Abdurrahman Wahid berjanji tidak akan melakukan perombakan terhadapnya. “tidak ada reshuffle”, demikian penegasan Presiden Abdurrahman Wahid di depan Pers (Maruto & Anwari, 2002).

Nampaknya pengunduran diri yang dilakukan Hamzah Haz merupakan awal melemahnya dukungan DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, apalagi pengganti Hamzah Haz tidak diambil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gejala konflik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan poros tengah makin memanas pada awal tahun 2000, sejak pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang menyebutkan bahwa PDI Perjuangan dan PKB sebagai dua partai besar di masa depan. Akibat dari pernyataan presiden Abdurrahman Wahid, telah membuat partai-partai yang tergabung dalam poros tengah (PPP, PAN, PBB, dan PK) menggelar acara “Aksi Sejuta Ummat” yang menyerukan peleburan partai-partai Islam ke dalam satu partai besar (Maruto & Anwari, 2002).

Gebrakan pertama Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Presiden ke empat Republik Indonesia adalah menghapus eksistensi Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos). Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Presiden Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa penghapusan itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan,

sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah (Otda) (Iskandar, 2004).

Seperti kita ketahui bahwa salah satu kendala dari pemberlakuan Otda adalah kurang terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi seluas mungkin berkaitan dengan kondisi daerah dan kebijakan pemerintah daerahnya melalui media massa yang ada tanpa harus ada intervensi Negara atasnya. Kendala ini akan teratasi jika Negara (Pemerintah daerah) hanya melakukan fungsi fasilitasi agar masyarakat mampu memperoleh seluruh informasi yang mereka butuhkan tanpa harus takut akan adanya intervensi pemerintah seperti yang terjadi di era orde baru.

Ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden, ia menghadapi tantangan yang keras dalam membangun demokrasi di Negara ini. Salah satu bentuk persoalan adalah aspirasi masyarakat, baik domestik maupun Internasional agar tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Menyusul laporan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Azasi Manusia (KPP HAM) Timor timur yang menyebut keterlibatannya Jenderal berbintang empat itu dalam pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor timur, Presiden Abdurrahman Wahid meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator bidang politik keamanan (Menko Polkam). Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk membebas tugaskan Jenderal Wiranto menimbulkan pro-kontra di dalam negeri, dari kalangan politisi, pengamat, bahkan dari kalangan tentara sendiri. Secara sengaja Presiden Abdurrahman Wahid meminta Wiranto mundur ketika ia tengah melakukan lawatan ke sejumlah Negara Eropa. Inilah cara Abdurrahman Wahid untuk menepis kekhawatiran masyarakat internasional bahwa otoritas sipil di Indonesia tidak sanggup mengendalikan kekuatan militer, penyokong utama kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Apalagi permintaan mundur itu dilakukan di tengah upaya masyarakat internasional mendorong pengadilan HAM internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM di Timor timur (Iskandar, 2004).

Upaya untuk membebas tugaskan Wiranto dari jabatannya itu, Presiden Abdurrahman Wahid dengan gagasannya itu, ingin mengembangkan tradisi baru bahwa jika ada pejabat Negara yang melakukan pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum lainnya, lebih baik jika yang bersangkutan mengundurkan diri agar memudahkan pemeriksaan. Dalam konteks ini, Presiden Abdurrahman Wahid sedang berusaha membangun budaya dan etika baru dalam sistem politik nasional.

Langkah itu pun merupakan bagian penting untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional.

Salah satu prestasi yang sangat besar dan patut di catat selama PRESIDEN Abdurrahman Wahid menjadi Presiden adalah penghapusan badan koordinasi bantuan pemantapan stabilitas nasional (Baskorstanas) dan lembaga penelitian khusus (Litsus). Kebijakan ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 tentang penghapusan Baskorstanas dan Litsus yang selama orde baru menjadi alat represif Negara (Iskandar, 2004). Kebijakan ini merupakan cermin gagasan besar Presiden Abdurrahman Wahid untuk meletakkan TNI pada tempat yang sebenarnya sekaligus mencabut sistem kontrol terhadap kebebasan masyarakat.

Kedua lembaga yang di masa lalu menjadi instrumen rezim otoriter ini dinilai tidak tepat lagi berada di alam politik baru yang demokratis. Kebijakan ini mendapatkan respon positif yang sangat luas dari masyarakat, hingga ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan itu dilakukan sejak dulu, karena fungsi dan perannya tidak jelas. Dengan kebijakan penghapusan Bakorstanas dan Litsus tersebut, secara otomatis berarti Keppres No. 29/1998 tentang Bakorstanas dan Keppres No. 16/1999 tentang Litsus telah resmi di cabut. Dalam hal ini Presiden Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa dua lembaga itu lebih banyak menimbulkan keruwetan dari pada kemanfaatan (Iskandar, 2004). Kebijakan pembubaran kedua lembaga tersebut bukanlah sebuah keputusan aksi “balas dendam” Presiden Abdurrahman Wahid apa yang terjadi di masa lalu. Namun, kebijakan tersebut adalah cita-cita lama dan pemikiran Abdurrahman Wahid sendiri mengenai demokrasi, pluralisme, HAM dan itu merupakan nilai-nilai yang kita perjuangkan selama ini.

Ketetapan MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari Tap berbunyi, “Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masingmasing.” Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, “TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.” Ayat (2) berbunyi, “ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan.”

Dalam pembahasan ini, maka langkah setrategis yang diambil Abdurrahman Wahid adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan Abdurrahman Wahid telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999 (iskandar, 2004). Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”.

Dengan kebijakan semacam ini, Redefinisi dan reaktualisasi peran TNI itu benar-benar diimplementasikan secara riil oleh Pemerintahan sipil. TNI tidak bisa lagi memperlakuk kepolisian untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan politik maupun keamanan. Reposisi ini merupakan aspek yang paling penting untuk mengembalikan keseimbangan sipil dalam rangka menciptakan demokrasi. Selama Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ketegangan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR terus mengalami intensitas dan eskalasi yang semakin memanas, misalnya pada kasus *buloggate* dan *bruneigate* yang dijadikan komoditas politik oleh musuh-musuhnya lewat pembentukan Pansus (Panitia Khusus) yang ditugasi untuk mengusut kedua kasus tersebut. Kasus *buloggate* yang melibatkan aliran pengucuran dana yanatera bulog sebanyak Rp 35 miliar kepada beberapa orang tertentu, termasuk Suwondo yang diduga merupakan orang terdekat Presiden. Sedang kasus *Bruneigate* melibatkan pemberian hadiah berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pihak Sultan Brunei kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Para musuh Abdurrahman Wahid menuduh dirinya tidak melaporkan pemberian hadiah itu kepada publik dan ia dianggap telah melanggar sumpah jabatan. Dan sebaliknya, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa uang tersebut adalah hibah dari pihak Sultan Brunei kepada dirinya sebagai pribadi.

Ketegangan Abdurrahman Wahid dengan DPR ditandai dengan dikeluarkannya memorandum I dan memorandum II oleh DPR, walaupun Abdurrahman Wahid menuduh Pansus sebagai ilegal karena tidak tercantum dalam lembaran Negara. Atas dasar hasil-hasil kerja Pansus, DPR menyatakan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid “dapat diduga terlibat dalam kasus bullogate dan

bruneigate.” Dengan mengambil kesimpulan bahwa Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh melanggar haluan Negara. Bagi Abdurrahman Wahid, Logika DPR itu terasa aneh karena sesuatu yang masih bersifat dugaan, tetapi telah dimanipulasi sebagai “sungguh-sungguh melanggar haluan Negara.” Presiden

Abdurrahman Wahid sendiri dengan kasus buloggate dan bruneigatenya belum di bawa ke pengadilan, karena secara hukum Presiden Abdurrahman Wahid belum dinyatakan bersalah. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid bertahan 22 bulan, banyak kebijakan-kebijakan Presiden yang mengalami delegitimasi politik dan sosial yang mengakibatkan Presiden Abdurrahman Wahid lengser dari jabatannya, diantaranya adalah:

1. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menghapus Departemen sosial dan pembubaran Departemen penerangan. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid Departemen sosial hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan, seperti korupsi dan dana bantuan kemanusiaan yang tidak sampai secara utuh kepada para korban bencana alam atau para pengungsi yang di daerahnya terjadi konflik sosial. Sedangkan Departemen penerangan di anggap sering diperalat untuk mendistorsi berbagai pemberitaan yang hanya menguntungkan kepentingan para penguasa orde baru.
2. Dicabutnya Tap MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme di seluruh wilayah Indonesia.
3. Membuka hubungan dagang (bukan hubungan diplomatik) dengan Negara zionis Israel
4. Pencopotan beberapa menteri dan bongkar pasang kabinet. salah satunya adalah Kwik Kian Gie dari Fraksi PDI-P, Laksamana Sukardi dari Fraksi PDI-P, Yusuf Kalla dari Fraksi GOLKAR, Bambang Soedibjo dari PAN, Jend. Wiranto (TNI/Menko polkam) dan Hamzah Haz dari Fraksi PPP, yang kemudian di susul dengan Susilo Bambang Yudhoyono (TNI/Menko Polsoskam) dan Yusril Ihza Mahendrata dari Fraksi PBB.
5. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang sering meninggalkan Megawati Soekarno putri (Wapres), terutama dalam hal kebijakan memberhentikan beberapa menteri dan mengangkat para penggantinya.
6. Hubungan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak harmonis dengan DPR-MPR.

7. Tindakan Presiden Abdurrahman Wahid yang melakukan penggantian Kapolri dalam waktu yang relatif singkat.
8. Ancaman Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberlakukan dekrit Presiden apabila kompromi politik antara dirinya (sebagai Presiden) dengan para pemimpin partai politik tidak tercapai.
9. Penolakan para pemimpin partai-partai politik (terutama PDIP, Golkar, PAN, PBB, dan PK) terhadap tawaran kompromi yang diajukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk mencairkan kebekuan dan kebuntuan politik akibat ketegangan yang berkepanjangan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan para musuh politiknya.
10. Dukungan TNI/Polri (sebagai institusi) yang dari waktu ke waktu kian menyusut terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Akan tetapi setelah Presiden Abdurrahman Wahid melakukan tindakan pencopotan terhadap Menko Polkam Wiranto, Kapolri Rusdiharjo dan Suroyo Bimantoro dan kemudian Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan TNI/Polri semakin menipis dan bahkan tidak ada sama sekali. Ini terbukti bahwa TNI/Polri tidak akan mendukung apabila Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club

(negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Ketidak stabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat *country risk* Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service mengkonfirmasi bertambah buruknya *country risk* Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh (*political will*) untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip *once and for all*. Pemerintah cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi fiskal, restrukturisasi utang, dan divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang *controversial* dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya *sense of crisis* terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini.

Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan *growth trend* yang negatif. Dalam perkataan lain, selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin

yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia, paling tidak untuk periode jangka pendek indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat terhadap pemerintah reformasi adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di bawah ini, pada awal tahun 2000 kurs rupiah sekitar Rp7.000,- per dolar AS dan pada tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari bersejarah sebagai awal kejatuhan rupiah, menembus level Rp10.000,- per dolar AS. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus melakukan intervensi pasar dengan melepas puluhan juta dolar AS per hari melalui bank-bank pemerintah. Namun, pada tanggal 12 Maret 2001, ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Presiden Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot.

Pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menyentuh Rp12.000,- per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. Pertama, perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, utang luar negeri (ULN) Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sangat besar. Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir Maret 2000 menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.

Rangkuman keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

- Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
- Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
- Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

D. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Setelah diangkat menjadi presiden dalam sidang istimewa MPR tahun 2001, Megawati membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Gotong Royong. Langkah langkah Politik Presiden Megawati antara lain:

1. Memelihara dan memantapkan stabilitas Nasional.
Usaha ini dilakukan dengan meningkatkan kerukunan antar sesama anak bangsa dan membenahi stabilitas ekonomi. Usaha Megawati ini mendapat pukulan berat akibat peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002.
2. Menjaga keutuhan NKRI
Usaha ini dilakukan dengan menindak tegas terhadap gejala-gejala daerah, yang akan memisahkan diri; misalnya kasus Aceh, Papua, Maluku, Poso, dan lain-lain.

3. Membangun tatanan politik baru

Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni:

- a. UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum.
- b. UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR
- c. UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden

Di samping itu, Megawati juga mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan UU tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik.

4. Melanjutkan amandemen UUD 1945 Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, maka dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen ini dilakukan melalui empat tahap. Amandemen ke-1 dan ke-2 telah disahkan masa pemerintahan sebelumnya, sedang amandemen ke-3 dan ke-4 disahkan masa pemerintahan Megawati.

5. Meluruskan otonomi daerah

Otonomi yang diterapkan di Indonesia sering menimbulkan penafsiran yang keliru, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan pemerintahan, antara lain:

- a. Timbulnya wacana ingin memisahkan dengan NKRI.
- b. Timbulnya daerahisme.
- c. Menolak aturan-aturan dari pemerintah pusat dan Penyimpangan penggunaah dana APBD.

Menyadari hal itu, maka pemerintah Megawati berusaha untuk meluruskan aturan otonomi daerah yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Megawati dalam bidang ekonomi antara lain:

- a. Memutuskan hubungan kerja dengan IMF
- b. Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan
- c. Meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan.
- d. Menciptakan situasi kondusif bagi investor
- e. Meningkatkan kegiatan ekspor.
- f. Mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah
- g. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan- kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

E. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menteri, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Seperti Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan

kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip *structural* Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan

infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006 (Rachbini, 2001).

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

F. Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Sejak menempati kursi pemerintahan, Presiden Joko Widodo baru menyelesaikan satu dari tiga tantangan yang dihadapinya. Tantangan yang dimaksud adalah stabilisasi politik. Di bidang politik, Presiden Joko Widodo harus diapresiasi, di mana euforia pertarungan lambat laun mulai di bawah kontrol Presiden Joko Widodo. Kubu oposisi sudah mulai terpecah, mencair, bahkan cenderung hanya Gerindra dan PKS yang jelas memosisikan diri sebagai oposisi. Sisanya sudah abu-abu dan ada yang merapat ke pemerintah. Akan tetapi, masalah stabilitas politik yang dihadapi justru berasal dari partai politik pendukungnya. Meski

memposisikan diri sebagai pendukung pemerintahan, partai-partai tersebut kerap kali berbeda pandangan dengan sang presiden. Kondisi ini membuat publik sempat mempertanyakan kemampuan Jokowi untuk menghadapi kekuatan politik yang dihadapinya. Bukan hanya sekadar mengedepankan integritas bersih yang diusungnya, tapi keberaniannya melawan setiap kekuatan yang jelas-jelas ingin perlemah pemberantasan korupsi. Setelah itu, tampak bahwa persaingan politik pasca Pilpres lalu belumlah hilang seutuhnya, masih berbekas dan tersisa. Terlebih dalam ranah politik formal institusi kepartaian mengelompok dalam koalisi pro dan kontra pemerintah, dalam analogi Indonesia Hebat dan Merah Putih.

Dapat dilihat bahwa kepentingan sesaat memang menjadi hal yang mencolok, karena kawan dan lawan sulit dibedakan bahkan bisa bertemu untuk kepentingan temporer. Satu yang pasti, presiden tampak mulai bersitegang dengan partai pengusungnya. Kemampuan relasional presiden dengan partai pendukung perlu kembali dibenahi. Memang pada awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo sudah dihadapkan pada konflik politik di parlemen. Konflik tersebut membelah parlemen menjadi dua kutub politik yang berseberangan, yakni kubu KMP dan KIH. Belum lagi, juga ada konflik di internal Partai Golkar dan PPP yang pada akhirnya juga melibatkan pemerintah untuk menyelesaikannya. Tarik menarik kepentingan politik ini tentu menguras waktu dan energi Pemerintah dan DPR sendiri. Akibatnya, program Pemerintah dan DPR tertunda. Target Pemerintah bersama DPR untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang masih sangat jauh dari target. Namun, konflik yang terjadi di parlemen akhirnya untuk sementara bisa dicairkan dengan berbagai pendekatan politik yang dilakukan oleh Jokowi-JK.

Jokowi-JK juga dihadapkan pada konflik suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) hingga isu terorisme dan bangkitnya komunisme. Konflik dan isu tersebut turut mewarnai dinamika sosial politik selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Untung saja, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Keadaan politik di atas tentunya ikut berpengaruh pada kecepatan gerak Presiden Joko Widodo dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya bagi kepentingan masyarakat. Pada aspek jalannya roda pemerintahan, para menteri nampak berjalan cepat, sesuai gerak institusi yang dikelolanya, meski kerap bersinggungan dan bergesekan satu dengan yang lain, memperlihatkan ketidakharmonisan para

penyelenggara negara. Tentu, dalam persoalan ini Leadership Skill Presiden perlu dikuatkan, mengatur fungsi dan kedudukan para menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan sesuai dengan bidang kerjanya.

Masih terkait kabinet, sebetulnya tidak hanya faktor kinerja menteri yang menjadi sorotan masyarakat, tetapi juga pada siapa yang menduduki jabatan menteri itu. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa penyusunan kabinet tidak semata berdasarkan transaksi politik semata, dengan mengorbankan faktor keahlian para Menteri itu sendiri di bidangnya, serta *track record* mereka yang baik. Pada awalnya, Presiden Joko Widodo sebetulnya telah menciptakan sinyal-sinyal kelembagaan ekonomi dan politik yang inklusif kepada masyarakat. Meski dilingkupi aktor-aktor yang tidak bebas kepentingan, Jokowi tetap bergeming memegang teguh prinsip non transaksional. Dalam tradisi politik transaksional, proses pencalonan presiden, maka orang-orang ataupun partai politik pendukung yang masuk dalam lingkaran tim kampanye bisa dipastikan mendapatkan jatah/posisi menteri, jabatan ataupun konsesi ekonomi lainnya. Semuanya sebagai timbal balik/balas budi atas jasa merebut kursi kepresidenan. Namun Presiden Joko Widodo tidak menerapkan tradisi tersebut. Presiden Joko Widodo sangat selektif dan cerdas memilih calon-calon pembantunya dengan melacak *track record* hingga pada catatan transaksi rekening orang yang digadang akan menjadi menteri dalam jajaran kabinetnya. KPK dan PPATK dijadikannya sebagai lembaga yang akan membantunya menfilter kebersihan calon menterinya dari perkara korupsi. Cara ini cukup efektif untuk mengurungkan ambisi para koruptor masuk dalam lingkaran kuasa kepresidenan tanpa “ngasorake” orang-orang yang dulu mendukungnya dalam proses pilpres. Namun, dalam perkembangan terakhir, dalam penentuan jabatan menteri, Presiden Joko Widodo tampak seperti terjebak dalam politik transaksional. Presiden terlihat dalam kondisi dilematis dan tersandera baik oleh parpol pendukungnya sendiri bahkan kepentingan wakilnya sendiri. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ekspektasi publik agar menteri yang diangkat bisa bekerja secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Hal yang tampak menonjol (terutama dalam masa 100 hari pertama pemerintahan) adalah usaha Presiden Joko Widodo dalam menertibkan sektor minyak bumi, begitu ia melantik kabinetnya. Langkah ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo memahami benar bahwa minyak bumi tidak sekedar barang ekonomi melainkan juga sudah menjadi komoditas politik. Kebijakan berikutnya

adalah, Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, jaringan jalan, tol laut, dan sejumlah mega proyek lainnya. Kebijakan peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera, merupakan hal yang patut diapresiasi.

Di bidang lain, pemerintah juga terus membangun konsolidasi birokrasi agar instruksi dari pusat bisa langsung dieksekusi oleh para aparat di daerah. Untuk mengubah mental seluruh aparat baik di pusat maupun di daerah, tidak bisa dilakukan dengan seketika. Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya juga menilai bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla memang sedang dalam tahap membenahi sejumlah masalah fundamental. Oleh karena itu, tantangan terberat Jokowi-Kalla adalah melawan dan menghadapi “ arus besar ” yang menginginkan pelemahan dalam pemberantasan korupsi.

Di bidang penegakan hukum dan HAM, Presiden Joko Widodo telah memberikan grasi kepada sejumlah orang yang selama ini bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), pelaksanaan eksekusi mati terhadap para gembong narkoba yang sudah memasuki tahap kedua, melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan ketentuan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), walaupun belum maksimal, membekukan sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) ilegal, mendukung sepenuhnya langkah KPK memberantas korupsi bersamasama aparat penegak hukum. Di bidang politik, walaupun pada awalnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dihadapkan kepada beragam 'gangguan politik' mulai dari "rivalitas yang tidak berkesudahan" antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun pada akhirnya Presiden Joko Widodo berhasil mempertahankan terjalannya komunikasi politik dengan parlemen, bahkan ada kecenderungan positif KMP mulai mengurangi tekanan-tekanan politiknya seiring dengan misi pemerintahan Jokowi-JK untuk menyejahterakan masyarakat berjalan pada rel yang benar dan dinilai baik oleh KMP.

Presiden Joko Widodo juga melakukan reshuffle kabinet terhadap para menteri yang 'lamban' bekerja dan diyakini reshuffle kabinet tidak akan berhenti dilakukan Jokowi sebagai langkah *punish and reward* serta evaluasi terus menerus. Selanjutnya adalah terkait kedaulatan maritim. Inilah untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia melihat ke laut, kawasan yang selama ini terabaikan. Selama ini laut Indonesia yang meliputi sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia lebih banyak menyejahterakan bangsa lain daripada bangsa Indonesia sendiri.

Tantangan yang yang dihadapi Presiden Jokowi dibidang ekonomi tidaklah mudah. Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan sejak 9 September 2015, berupaya untuk menyentuh berbagai aspek. Tujuannya untuk menangkai perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan domestik dengan cara memperbaiki struktur ekonomi yang lebih kondusif bagi berkembangnya industri, kepastian berusaha di bidang perburuan, kemudahan investasi, memangkas berbagai perizinan serta memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan kredit perbankan (ekon.go.id). Terdapat beberapa kebijakan Jokowi dalam segi ekonomi:

- Kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Menurut Jokowi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan ini dilakukan guna menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan mendorong percepatan belanja pemerintah dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran.
- Melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Antara lain dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Bunga KUR yang dulunya 22-23 persen (diturunkan) menjadi 12 persen. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di desa, lanjut presiden, pemerintah juga mengupayakan percepatan pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa.
- Kebijakan ekonomi tambahan untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Untuk mendorong daya saing industri, Jokowi menyebutkan terdapat 89 peraturan dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak. kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih aturan dan duplikasi kebijakan. Terkait percepatan proyek strategis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan menghilangkan berbagai hal yang selama ini menyumbat pelaksanaannya.

- Pemerintah akan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Ia ingin menekankan di sini bahwa paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil kita yang akhirnya memberikan fondasi pelompatan kemajuan perekonomian kita ke depannya.

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perbaikan ekonomi antara lain, Di bidang perdagangan, pemerintah telah meluncurkan *Indonesia National Single Window* (INSW) yang diperbarui, sehingga siapa pun dapat memantau keluar-masuk barang ekspor-impor melalui satu sistem.

Dengan demikian akurasi data dan informasi kepabeaian dapat dipertanggung-jawabkan dengan transparan atau dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Semua perizinan, dokumen, data, dan informasi lain yang diperlukan dalam pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor dan distribusi kini sudah harus dilakukan melalui *Indonesia Nasional Single Window* (INSW). Melalui INSW, tidak akan ada lagi proses birokrasi yang dilakukan secara manual dan tatap muka yang selama ini menjadi hambatan kelancaran arus barang, bahkan membuat distorsi yang membebani daya saing industri dan melemahkan daya beli konsumen.

Di bidang energi, pemerintah telah menurunkan harga solar sebesar Rp 200 pada Oktober 2015 ini. Selain itu, pemerintah juga mendorong nelayan untuk beralih dari penggunaan bahan bakar solar menjadi bahan bakar gas. Di bidang perbankan, pemerintah memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas menengah-bawah untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yakni 12 persen. Tak cuma itu, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendukung UKM yang berorientasi ekspor atau yang terlibat dalam produksi untuk produk ekspor, pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman atau kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial. Fasilitas ini terutama diberikan kepada perusahaan padat karya dan rawan PHK. Untuk menarik investor, terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi

ini adalah mereka yang memiliki rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang.

Di bidang fiskal, pemerintah menyediakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan mulai dari 10 hingga 100 persen untuk jangka waktu 5-10 tahun (*tax holiday*). Persyaratan penerima *tax holiday* adalah wajib pajak baru yang berstatus badan hukum, membangun industri pionir dengan rencana investasi minimal Rp 1 triliun, rasio utang terhadap ekuitas (*debt equity ratio*) 1:4, serta mengendapkan dana di perbankan nasional minimal 10 persen dari total rencana investasi hingga realisasi proyek.

Yang disebut industri pionir meliputi industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik, industri permesinan, industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan, industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, transportasi kelautan, industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur. Insentif fiskal lainnya yang ditawarkan pemerintah adalah pengurangan penghasilan netto sebesar 5 persen setahun selama enam tahun sebagai dasar pengenaan PPh badan (*tax allowance*).

Fasilitas ini berbeda dengan *tax holiday* karena tidak mengurangi tarif PPh badan sebesar 25 persen, tetapi mengurangi penghasilan kena pajak maksimal 30 persen selama enam tahun. *Tax allowance* juga memperhitungkan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pemberian tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, serta mengurangi 10 persen tarif PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak di luar negeri.

Pada sektor perburuhan, kebijakan untuk menerapkan formula pada penghitungan Upah Minimum juga disambut baik karena memberikan kepastian, baik kepada pengusaha maupun buruh, tentang kenaikan upah yang bakal diterima buruh setiap tahun dengan besaran yang terukur. Beberapa contoh deregulasi yang telah dilakukan itu menunjukkan konsistensi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya penyederhanaan peraturan dan perizinan, kemudahan berinvestasi, serta mendorong daya saing industri. Pada saat yang sama, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kegiatan produktif dan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan yang pro rakyat. Bersama-sama BI dan Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah bekerja dan hadir untuk memulihkan kepercayaan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Aryojati Ardipandanto. 2015. *Satu Tahun Pemerintahan Jokowi – JK* [online] tersedia dalam:
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-20-II-P3DI-Okttober-2015-81.pdf diakses pada 3 Desember 2016.

Fachry Ali. 2013. *ESAI POLITIK TENTANG HABIBIE (Dari Teknokrasi ke Demokrasi)*. Jakarta : MIZAN.

Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam, Demokratisasi, Dan Pemberdayaan Civil Society*. Cet. I, Jakarta : Erlangga.

Iskandar, Muhaimin. 2004. *Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*. Cet. I, Yogyakarta: LKis Yogyakarta

MD, Maruto dan WMK, Anwari. 2002. *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat; Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Pasaribu, Rowland B.F. T,t. *Sitem Perekonomian di Indonesia*. [online] terdapat pada
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXx7XfIN3QAhWLMY8KHSXPCFkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Frowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F35471%2Fsistem-perekonomian-indonesia.pdf&usg=AFQjCNHn5Eu8-sjDLtDpiFBFpRi8weHggQ&sig2=a4YuarIIQeYMWOT65f4L1g&bvm=bv.139782543,d.c2l diakses pada 3 Desember 2016.

Rachbini, Didik J. 2001. *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*. Jakarta.

Rahardjo, M. Dawam 1983. *Esei-esai Ekonomi Politik*. Jakarta; LP3Es.

Sulastomo. 2008. *Hari-hari yang panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru*. Jakarta: Kompas.

Taufik Abdullah. 2009. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Icthiar Baru van Hoeve.

Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.